

Kedudukan Monev dalam Manajemen Pembangunan



Seminar Akhir Evaluasi RPJMD Kota Ternate 2011-2015
Ternate, 1 Juni 2015



PEMERINTAH KOTA TERNATE
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

SEMINAR AKHIR EVALUASI RENCANA KOTA TERNATE 2011 - 2015



Ir. Arifin Djafar,
Wakil Walikota Ternate





Dadang Solihin

Doktor Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran dan MA *in Economics* dari University of Colorado at Denver, USA ini adalah *Senior Strategic Planner* pada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Pernah menjadi Direktur selama 7 tahun di Bappenas, Sarjana Ekonomi Pembangunan FE Unpar ini sudah menghasilkan beberapa buku tentang Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, dll.

Dadang Solihin adalah peserta terbaik Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXIX tahun 2010 LAN-RI Jakarta dan peserta terbaik Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX tahun 2013 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI yang dinyatakan lulus Dengan Pujian serta dianugerahi Penghargaan Wibawa Seroja Nugraha.

Karya-karyanya tersebar di berbagai media terutama di media on-line. Silahkan email dadangsol@gmail.com HP 08129322202 web: <http://dadang-solihin.blogspot.com>

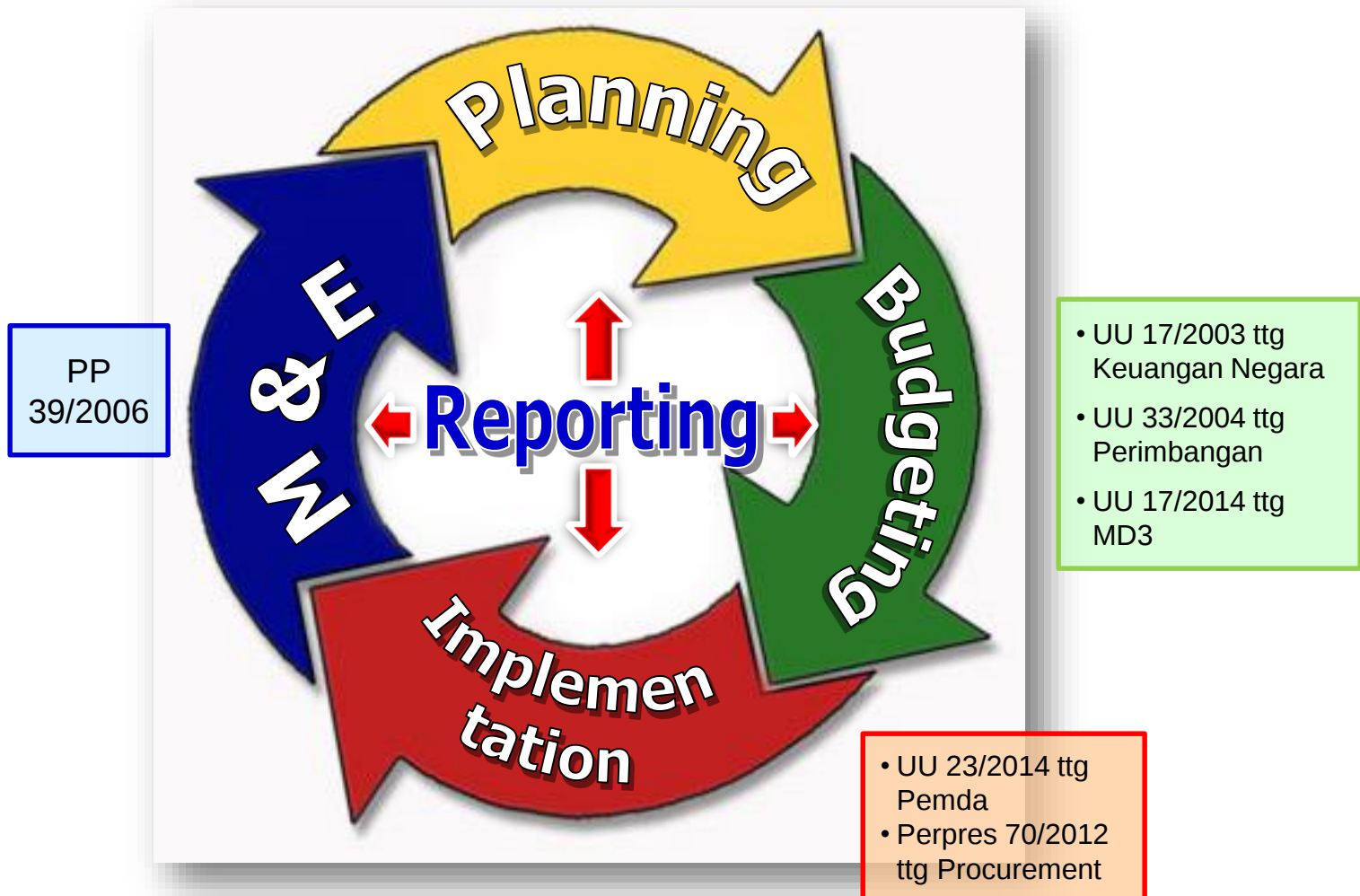
Materi

- Siklus Manajemen Pembangunan
- Sinergi RPJMD-Renstra SKPD
- Proses Perencanaan
- Status Hukum Dokumen Perencanaan
- UU25/2004 tentang SPPN
- Pelaku Pembangunan: *Stakeholders*
- Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
- Sinergi Stakeholders
- Penyelarasan RPJMD-RPJMN 2015-2019
- Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional di Provinsi Maluku Utara

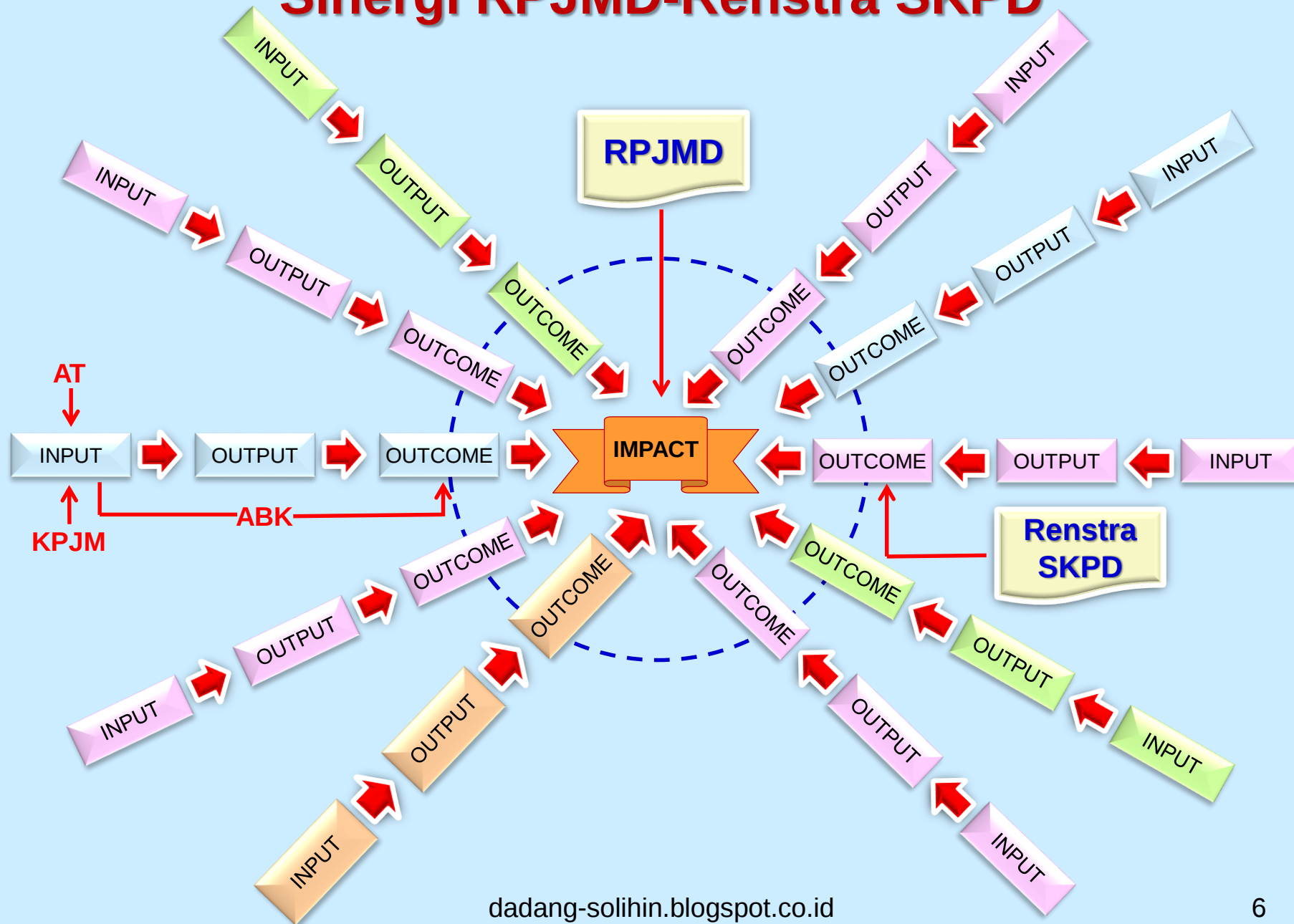


Siklus Manajemen Pembangunan

UU25/2004
ttg SPPN



Sinergi RPJMD-Renstra SKPD



Proses Perencanaan



Pendekatan Politik:

Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (*public choice theory of planning*), khususnya penMalutan Visi dan Misi dalam RPJM/D.



Proses Teknokratik:

Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.



Partisipatif:

Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh *stakeholders*, antara lain melalui Musrenbang.



Proses top-down dan bottom-up:

Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

Status Hukum Dokumen Perencanaan

NASIONAL		DAERAH	
Dokumen	Penetapan	Dokumen	Penetapan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional)	UU (Ps. 13 Ayat 1)	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah)	Perda (Ps. 13 Ayat 2)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional)	Per Pres (Ps. 19 Ayat 1)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah)	Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3)
Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL)	Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2)	Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)	Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah (RKP)	Per Pres (Ps. 26 Ayat 1)	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL)	Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1)	Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)	Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 21 Ayat 3)

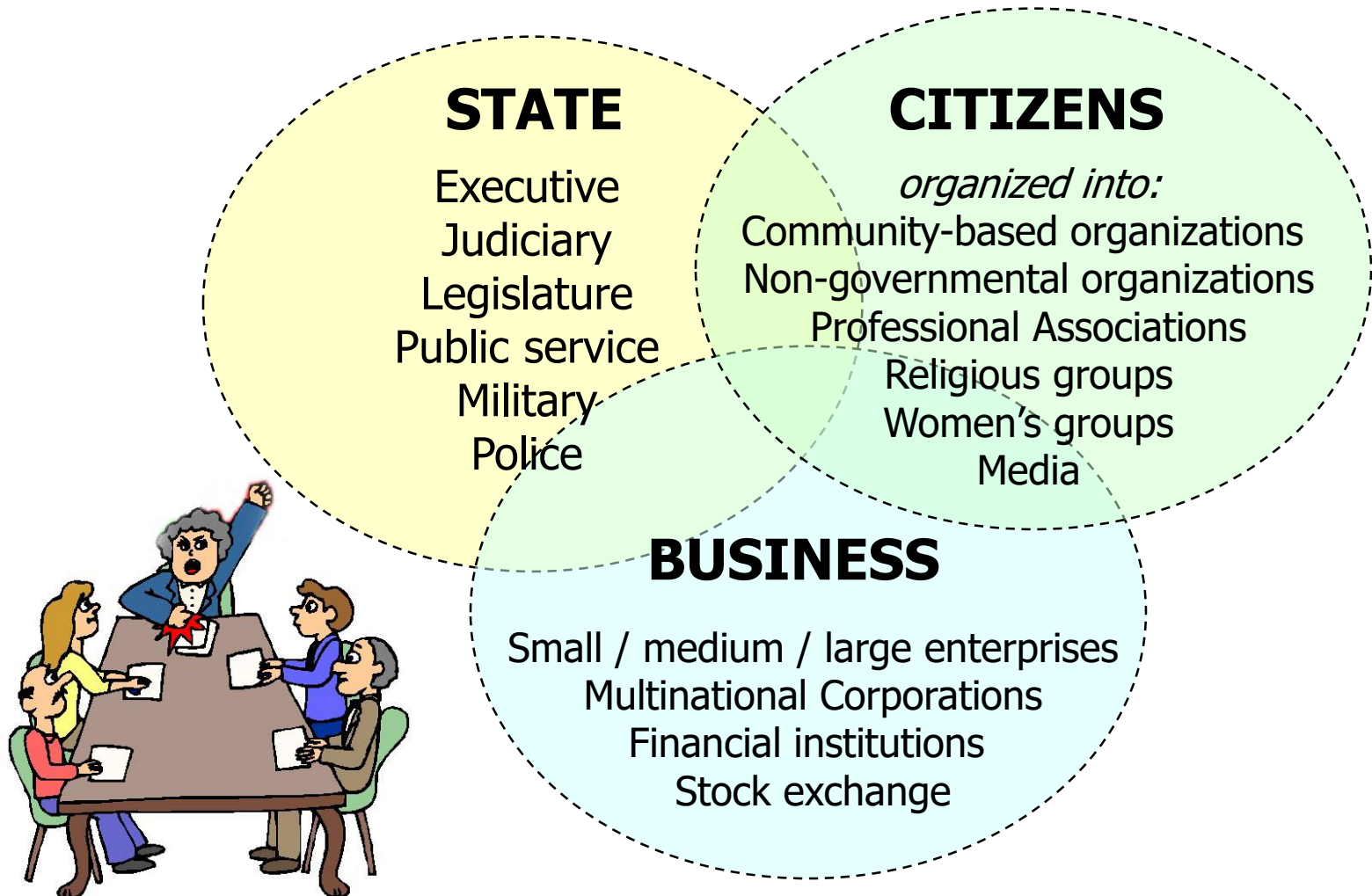
UU25/2004 tentang SPPN

SPPN adalah

- ❑ Satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan
- ❑ Untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
- ❑ Yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.



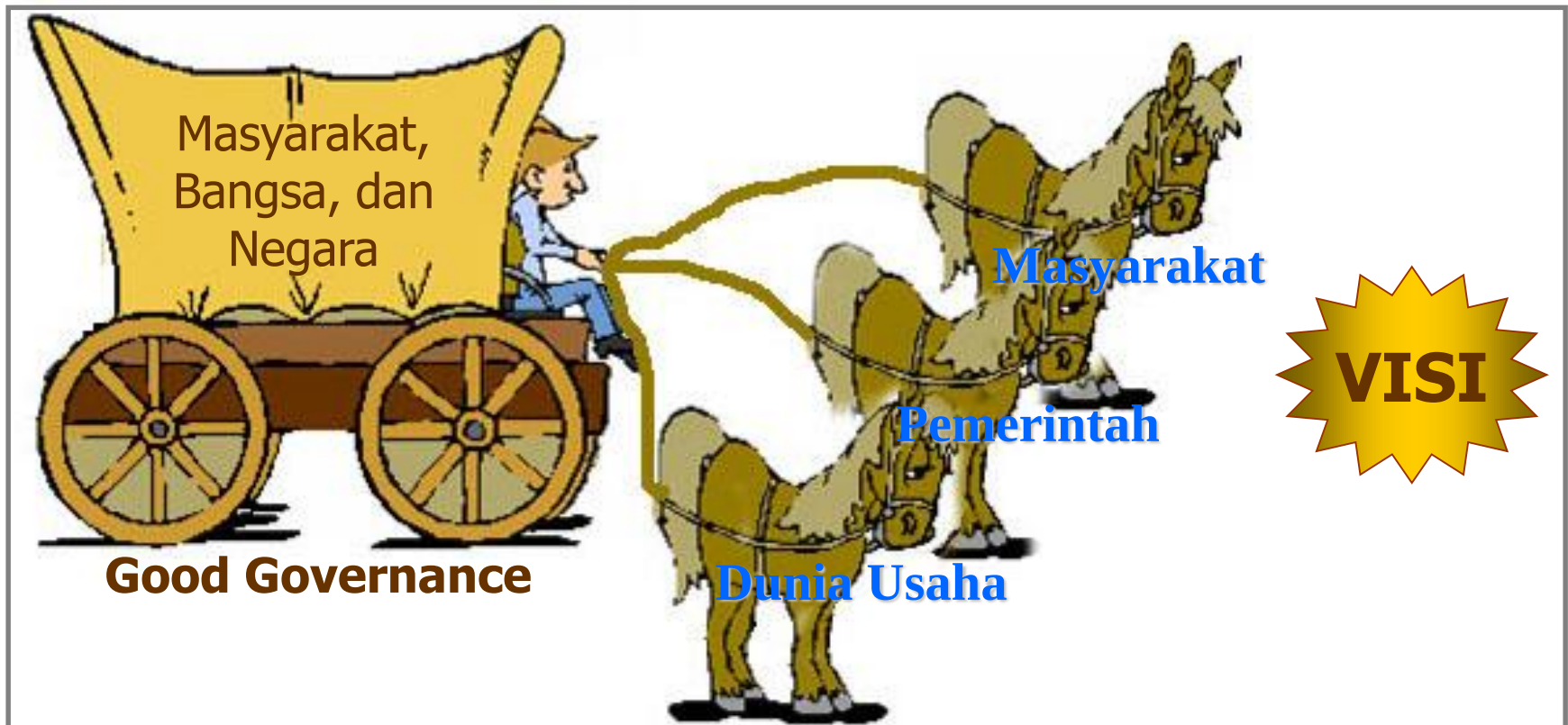
Pelaku Pembangunan: *Stakeholders*



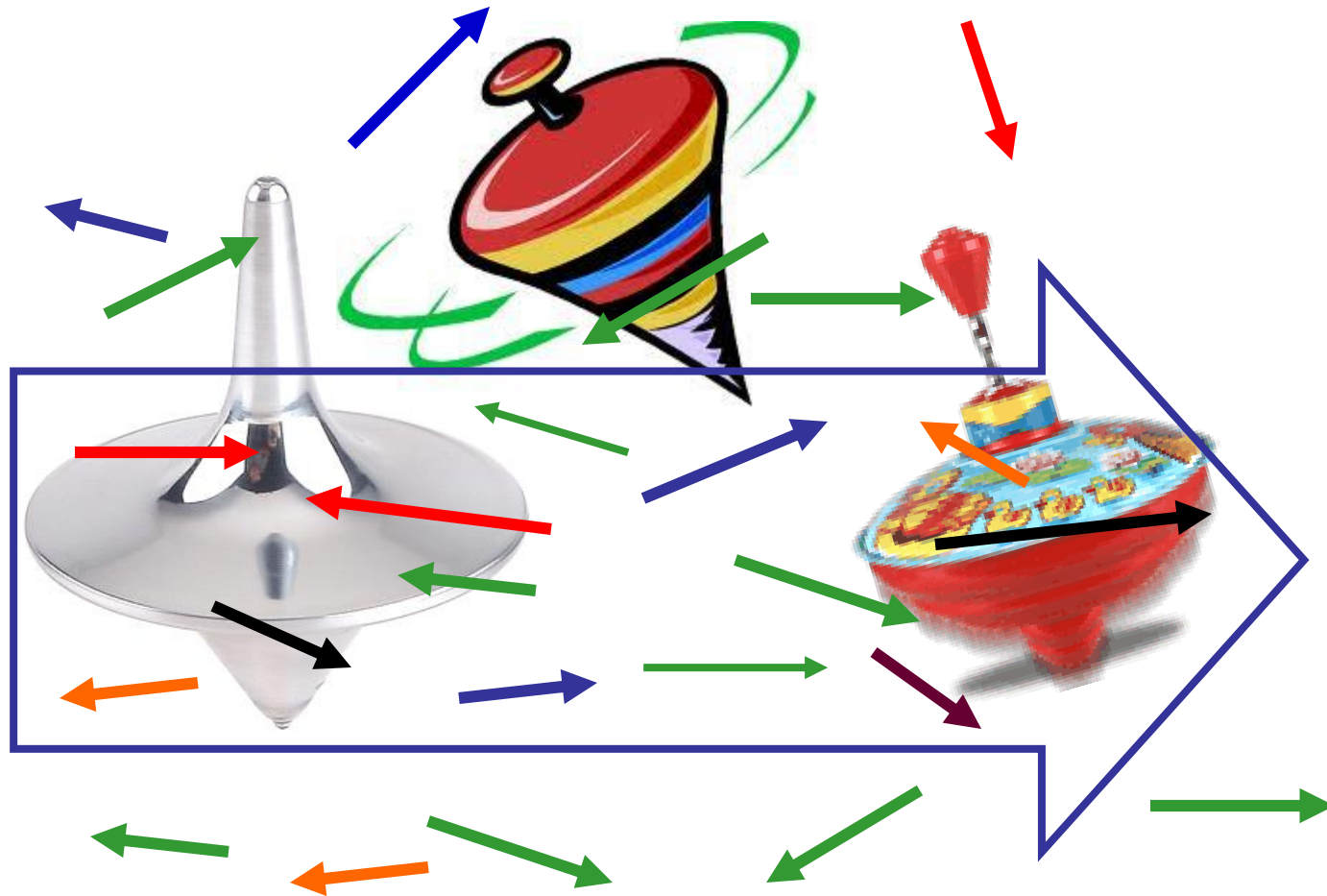
Troika



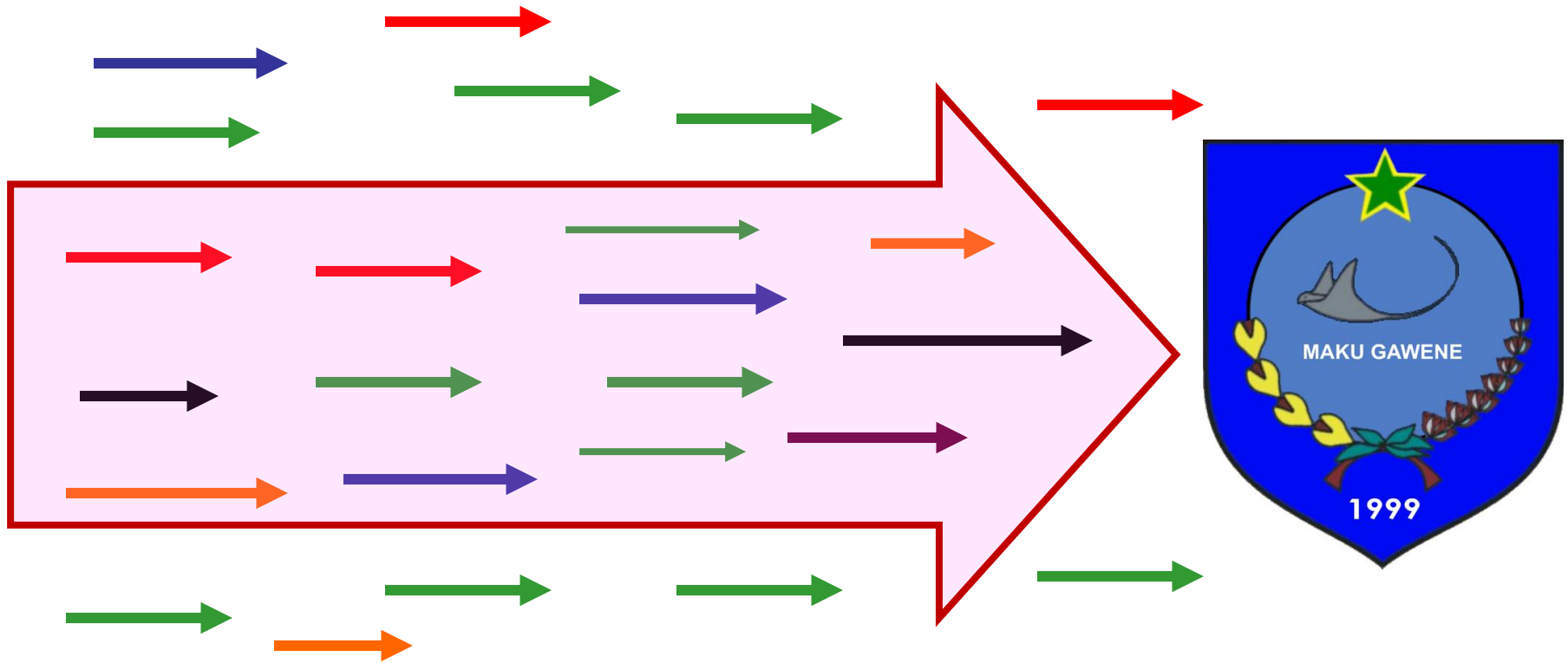
Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat



Sinergi Stakeholders



Sinergi *Stakeholders*





Penyelarasan RPJMD-RPJMN 2015-2019

Penyelarasan Sasaran Makro

Indikator	Target RPJMD	Target RPJMN
Pertumbuhan Ekonomi		
Tingkat Pengangguran		
Tingkat Kemiskinan		



Penyelarasan Sasaran Pokok

Sasaran	Ya	Tidak	Target RPJMD	Rekomendasi Target (hingga akhir periode RPJMD)
I. Sasaran Makro				
Pembangunan Manusia dan Masyarakat				
1. Indeks Pembangunan Manusia				
2. Indeks Pembangunan Masyarakat				
3. Indeks Gini				
4. Meningkatnya presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan				
4. Kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan				
- Pekerja Formal				
- Pekerja Informal				
Dst...				

Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Kepulauan Maluku Per Provinsi Tahun 2015-2019

Wilayah	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Maluku	6.9	7.3	8.3	8.4	8.6
Maluku Utara	5.9	6.3	7.0	7.5	7.8

Sasaran Tingkat Kemiskinan Wilayah Kepulauan Maluku Per Provinsi Tahun 2015-2019

Wilayah	Tingkat Kemiskinan (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Maluku	18.9	17.9	16.5	15.0	13.6
Maluku Utara	6.6	6.1	5.6	5.1	4.6

Sasaran Tingkat Pengangguran Wilayah Kepulauan Maluku Per Provinsi Tahun 2015-2019

Wilayah	Tingkat Pengangguran (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Maluku	7.0	6.7	6.4	6.1	5.9
Maluku Utara	4.4	4.2	4.0	3.8	3.6

Lokasi Prioritas Peningkatan Keterkaitan Desa-Kota untuk Memperkuat Pusat Pertumbuhan di Maluku

Kode	Lokasi Kawasan	Kelompok Kawasan	Komoditas Unggulan
D1	Daruba dan sekitarnya (Kab. Pulau Morotai, Prov. Maluku Utara)	- PKSN Daruba - Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap: Morotai - Kawasan Pariwisata: KSPN Morotai - Kawasan Transmigrasi: Morotai	- Perikanan Tangkap - Wisata bahari dan kepulauan
D2	Maba dan sekitarnya (Kab. Halmahera Timur, Prov. Maluku Utara)	- Perkotaan Maba - Kawasan Agropolitan (Padi): Wasile, Wasile Timur, Maba Tengah - Kawasan Transmigrasi: Subaim - Kota Otonom Terdekat : Tidore Kepulauan	- Padi - Jagung - Sagu
D3	Bula dan sekitarnya (Kab. Seram Bagian Timur, Prov. Maluku)	- PKW Bula - KPB Kobisonta - Kawasan Transmigrasi: Bula, - Pusat pertumbuhan kawasan Seram.	- Cengkeh - Palawija - Kakao

Prioritas Lokasi Pengembangan Pusat Kegiatan Kepulauan Maluku 2015-2019

Provinsi	Pusat Kegiatan dalam RTRWN		
	PKN	PKW	PKSN
Maluku	Ambon (I/C/1)	Masohi (I/C/1)	Saumlaki (I/A/2)
		Werinama (II/C/2)	Ilwaki (II/A/2)
		Kairatu (II/C/1)	Dobo (II/A/2)
		Tual (II/C/1)	
		Namlea (II/C/1)	
		Wahai (II/B)	
		Bula (II/B)	
Maluku Utara	Ternate (I/C/1)	Tidore (I/C/1)	Daruba (I/A/2)
		Tobelo (II/C/2)	
		Labuha (II/C/1)	
		Sanana (II/C/2)	

Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Nasional di Kepulauan Maluku

No	KSN	Tipe	Strategi	K/L
1	Kawasan Perbatasan Maluku	Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan	Mengembangkan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan yang mendukung kedaulatan dan keutuhan batas wilayah negara) di Kawasan Perbatasan Maluku, Kawasan Perbatasan Maluku Utara-Papua Barat	- Kementerian Agraria dan Tata Ruang (PU) - BNPP - Kementerian Pertahanan
2	Kawasan Perbatasan Maluku Utara-Papua Barat			
3	Kawasan Laut Banda	Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumberdaya Alam	Mengembangkan Kawasan Laut Banda sebagai Lumbung Ikan Nasional dengan memperhatikan kelestarian keanekaragaman hayati	- Kementerian Agraria dan Tata Ruang (PU) - Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional di Provinsi Maluku Utara



Perhubungan Udara

RPJMN	RPJMD Malut	RPJMD Ternate
1. Pengembangan Bandara Sultan Babullah Ternate 2. Pembangunan Bandara Pitu Morotai 3. Pengembangan Bandara Oesman Sadik Labuha		

Perhubungan Laut

RPJMN	RPJMD Malut	RPJMD Ternate
1. Pengembangan Pelabuhan Sofifi/Kaiyasa 2. Pengembangan Pelabuhan Subaim 3. Pengembangan Pelabuhan Malbufa 4. Pengembangan Pelabuhan Tikong 5. Pengembangan Pelabuhan Wayaluar-Obi 6. Pengembangan Pelabuhan Saketa 7. Pengembangan Pelabuhan Bosua 8. Pembangunan Pelabuhan Khusus di Tanjung Buli 9. Pengembangan Pelabuhan Tobelo 10. Pengembangan Pelabuhan Matui-Jailolo		

Perhubungan Laut

RPJMN	RPJMD Malut	RPJMD Ternate
11. Pengembangan Pelabuhan Labuha/Babang 12. Pengembangan Pelabuhan Laut Falabisahaya 13. Pengembangan Pelabuhan Loleojaya 14. Pengembangan Pelabuhan Tifure 15. Pengembangan Pelabuhan Manu/Gamumu 16. Pengembangan Pelabuhan Bicoli 17. Pengembangan Pelabuhan Tapaleo 18. Pengembangan Pelabuhan Daruba 19. Pengembangan Pelabuhan Damao 20. Pengembangan Pelabuhan Dorume		

Perhubungan Laut

RPJMN	RPJMD Malut	RPJMD Ternate
21. Pengembangan Pelabuhan Galela 22. Pengembangan Pelabuhan Bisui 23. Pengembangan Pelabuhan Kotiti 24. Pengembangan Pelabuhan Indari 25. Pengembangan Pelabuhan Yaba 26. Pengembangan Pelabuhan Banemo 27. Pengembangan Pelabuhan Laiwui 28. Pengembangan Pelabuhan Wayabula 29. Pengembangan Pelabuhan Gebe 30. Pembangunan Dermaga General Cargo 100 meter - Pelabuhan Sofifi 31. Pembangunan Pelabuhan Ternate		

Jalan

RPJMN	RPJMD Malut	RPJMD Ternate
1. Pembangunan Jalan Daruba - Wayabula - Sopi - Barebare		
2. Pembangunan Jalan Lingkar Halmahera Bagian Selatan (Weda - Matuting - Gane, Sakea - Dehep - Payahe)		
3. Pembangunan Jalan Lingkar Halmahera Bagian Tengah (Boboneigo-Ekor-Subaim-Lolobata-Tamtam-Akelamo-Gamloba-JaraJara-Buli-Maba-Sagea-Patani)		
4. Pembangunan Jalan Lingkar Halmahera Bagian Utara (Sidangoli-Jailolo-Goal-Kedi-Galela)		

ASDP

RPJMN	RPJMD Malut	RPJMD Ternate
1. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Mangole 2. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Obi 3. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Wahai 4. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Makian 5. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sofifi 6. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Soasio 7. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Weda * 8. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Moti 9. Pengembangan Sisi Darat Dermaga Penyeberangan Bastiong		

Ketenagalistrikan

RPJMN	RPJMD Malut	RPJMD Ternate
1. PLTMG Mobile PP (Ternate) 30 MW 2. PLTMG Mobile PP (Sofifi) 10 MW 3. PLTMG Mobile PP Tobelo 10 MW 4. Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi		

Telekomunikasi dan Informatika

RPJMN	RPJMD Malut	RPJMD Ternate
1. Pembangunan backbone Palapa Ring, Telekomunikasi Informatika 2. Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota 3. Pengembangan transmisi penyiaran TVRI		

Sumber Daya Air

RPJMN	RPJMD Malut	RPJMD Ternate
1. Pembangunan Konstruksi Pengamanan Pantai Maba Thp. I KAB. HALMAHERA TIMUR 2. Pembangunan Konstruksi Pengamanan Pantai Jailolo Thp. I KAB. HALMAHERA BARAT 3. Pembangunan Konstruksi Pengamanan Pantai Bisui & Tabahidayat KAB. HALMAHERA SELATAN 4. Pembangunan Konstruksi Pengamanan Pantai Obi Thp. I KAB. HALMAHERA SELATAN 5. Pembangunan Embung Pulau Sanana Kab. Kepulauan Sula 6. Pembangunan Bendung dan Jar. Irigasi D.I. Jani 650 Ha Halmahera Barat 7. Pembangunan Bendung & Jaringan Irigasi DI. Leleseng 1500 Ha Halmahera Timur		

Pendidikan

RPJMN	RPJMD Malut	RPJMD Ternate
1. Peningkatan akses layanan pendidikan untuk pulau kecil dan terluar melalui SD dan SMP satu atap		

Kesehatan

RPJMN	RPJMD Malut	RPJMD Ternate
1. Peningkatan akses layanan kesehatan terutama untuk pulau kecil dan terluar (infrastruktur dan tenaga kesehatan)		

Perumahan

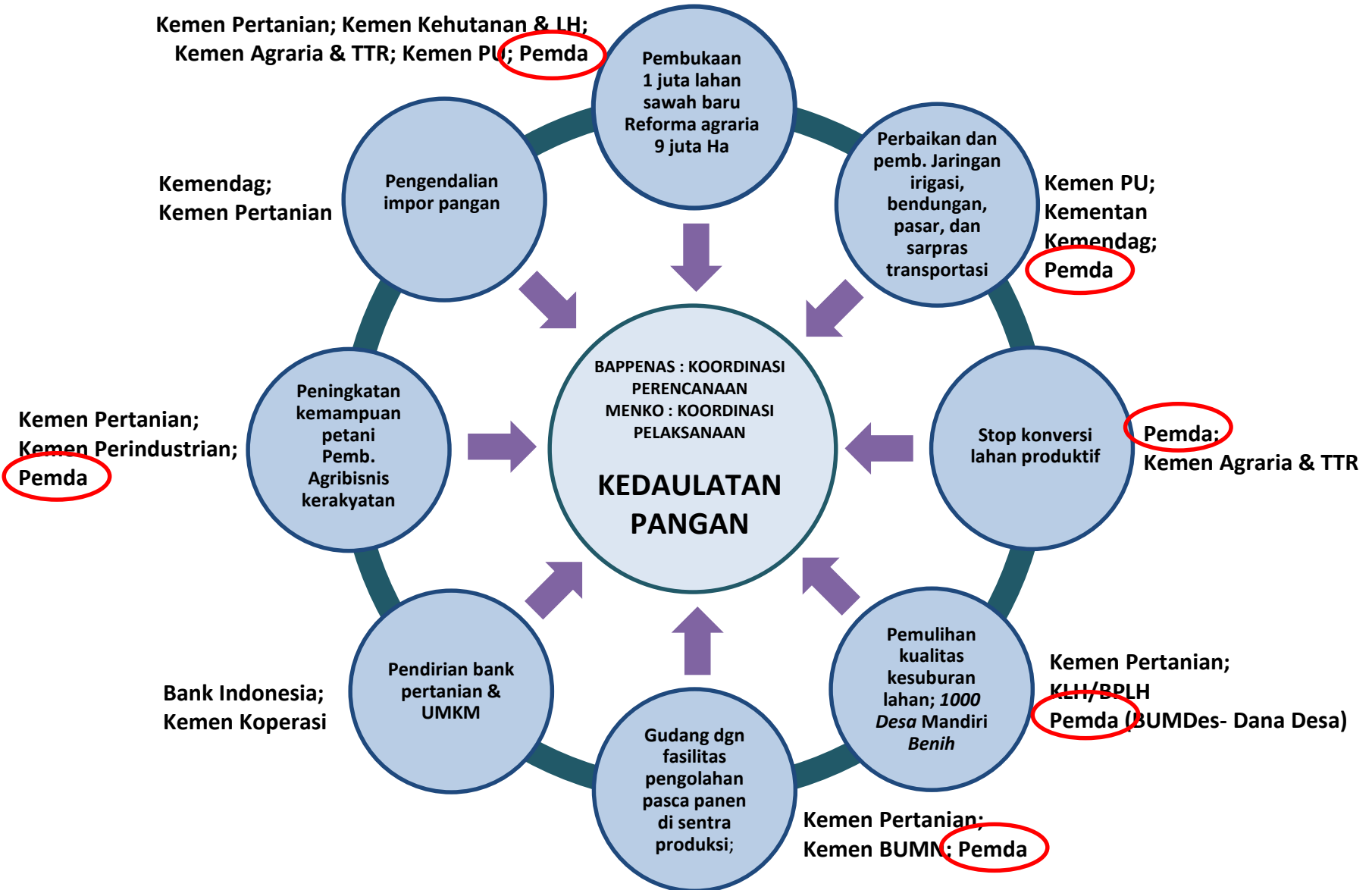
RPJMN	RPJMD Malut	RPJMD Ternate
1. Rusunawa: Sofifi, Ternate, Tobelo, Bacan/Babang, Sanana, Buli, dan Weda 2. SPAM Kota Ternate (Batang Dua dan Pulau Hiri) 3. SPAM Khusus di Pulau Morotai, Pulau Sula, dan Pulau Taliabu 4. SPAM Tidore tersebar; SPAM Halmahera Barat; SPAM Halmahera Selatan; SPAM Halmahera Tengah, SPAM Halmahera Utara;		

Penyelarasan RPJMD-RPJMN dalam Multilateral Meeting

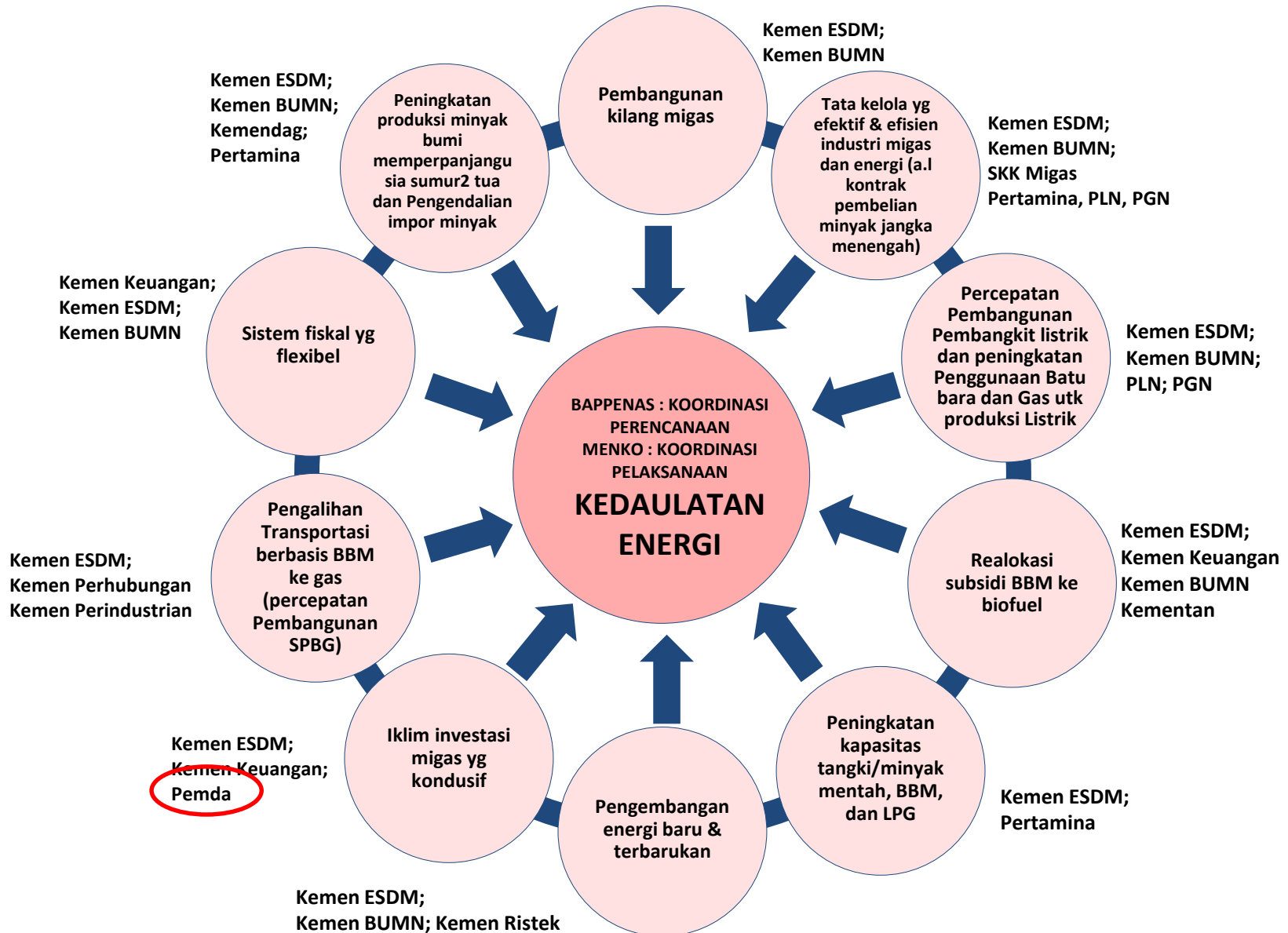
- Koordinasi Perencanaan Multilateral/K/L/D terhadap masing-masing **Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA)** meliputi:
 1. Kedaulatan pangan
 2. Kedaulatan energi
 3. Kemaritiman
 4. Industri/Kawasan Industri
 5. Pariwisata
 6. Revolusi mental
 7. Kawasan Perbatasan



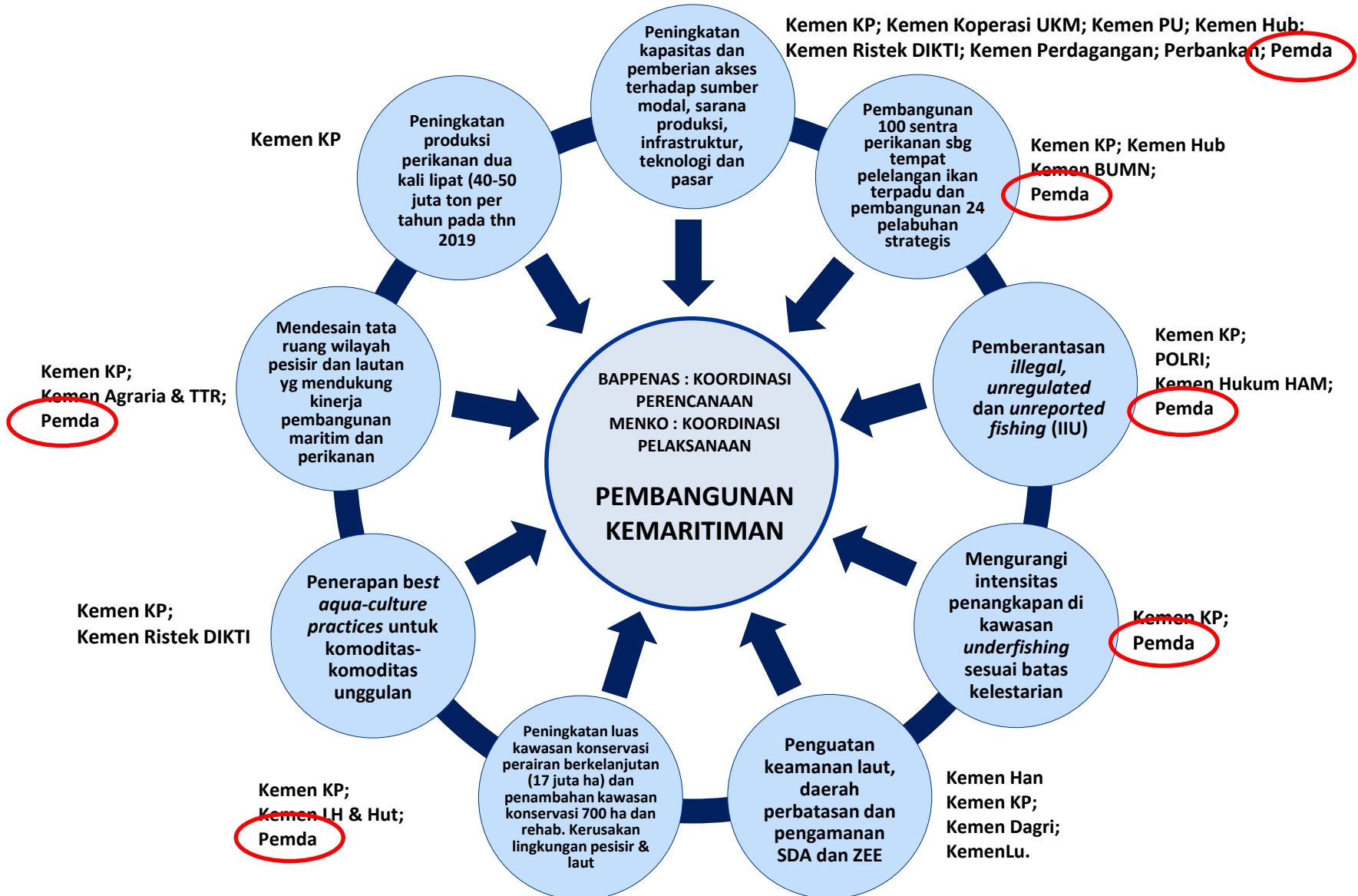
1. Kedaulatan Pangan



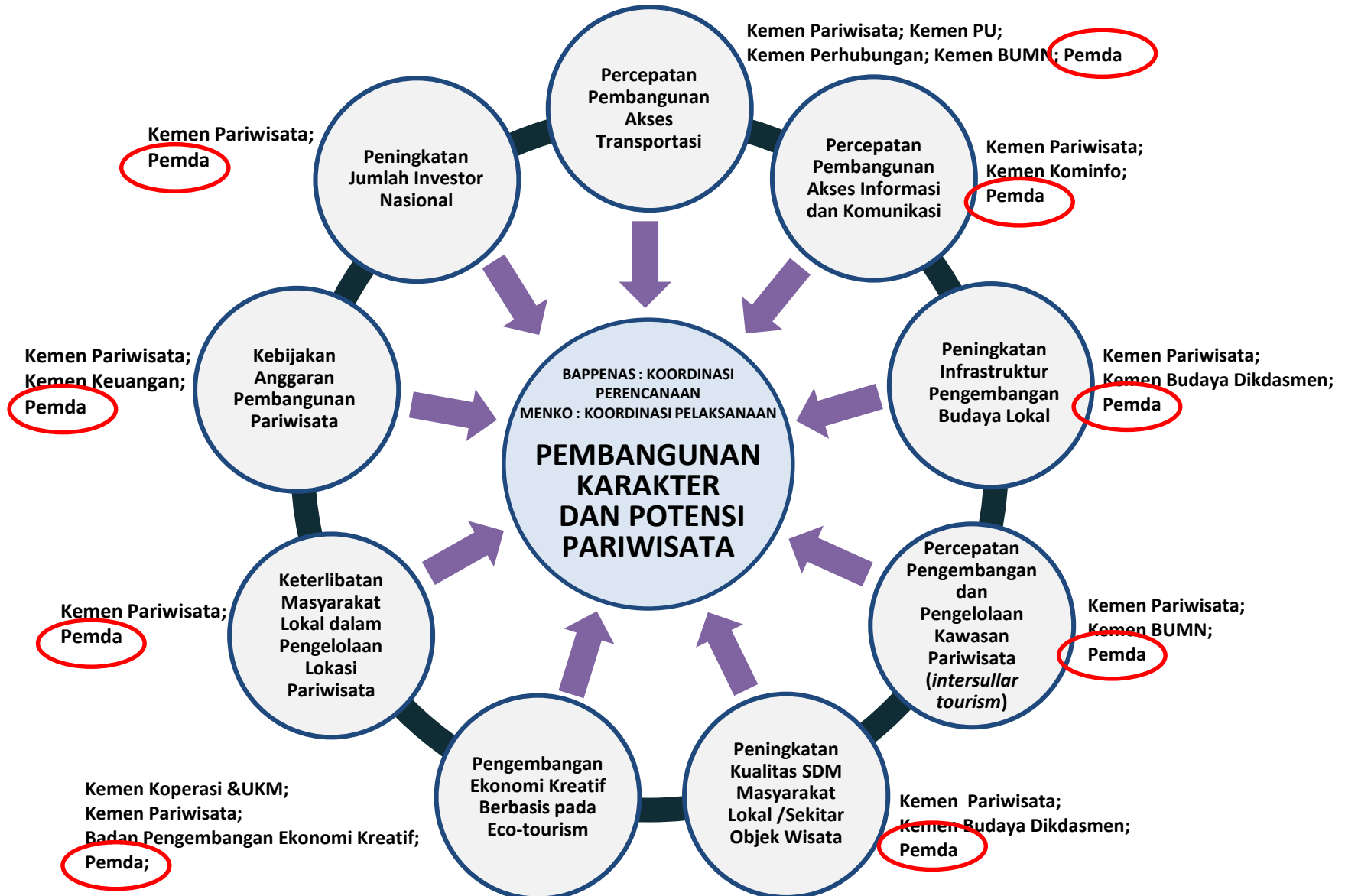
2. Kedaulatan Energi



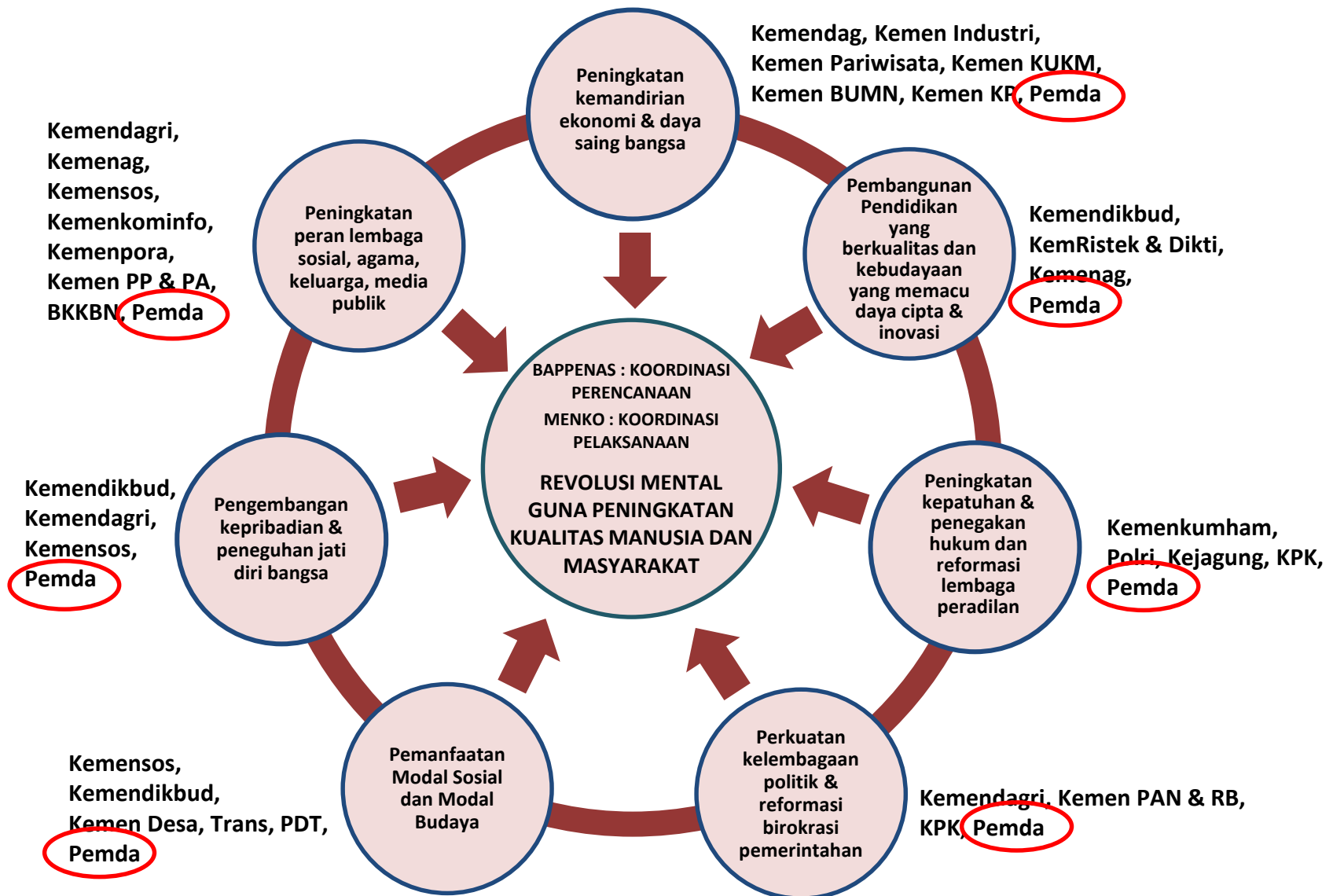
3. Kemaritim



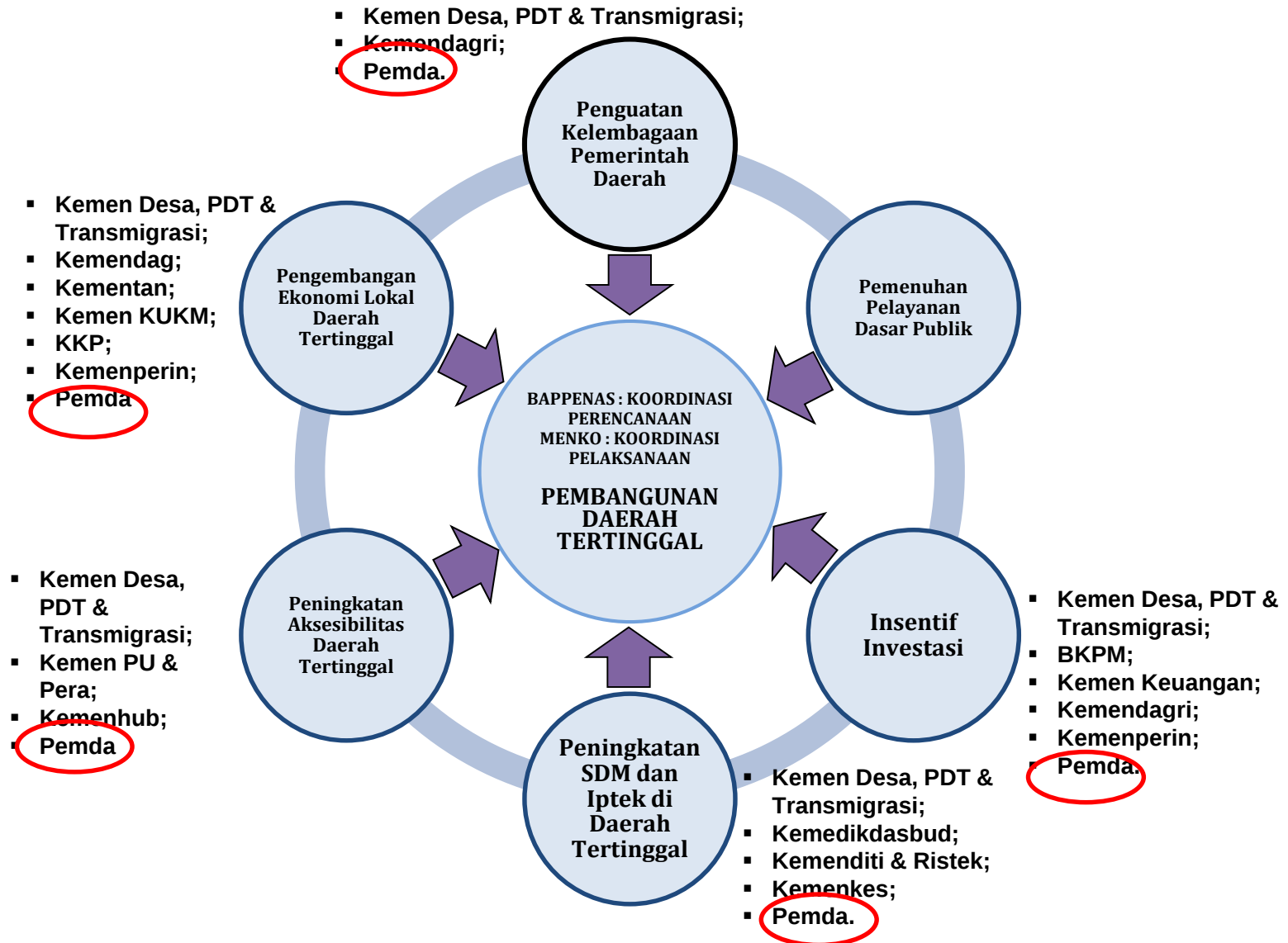
5. Pembangunan Karakter dan Potensi Pariwisata



6. Revolusi Mental



Pembangunan Daerah Tertinggal





Terima Kasih